

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
DAERAH, PEMAHAMAN AKUNTANSI, DAN KETAATAN PADA
PERATURAN PERUNDANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
(Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang)
Dina Karima*), Maslichah**), Dwiyani Sudaryanti**)**

Universitas Islam Malang
Email: dinakarima1998@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to determine the effect of the application of the local government accounting system, understanding of accounting, and adherence to laws and regulations on the performance accountability of local government agencies. The case study in this research is the sampan regency work unit. The sample used in this study were 78 respondents. This study uses multiple regression analysis. The results of this study are that simultaneously the variables of the Implementation of the Local Government Accounting System (X1), the Accounting Understanding variable (X2) and the Obedience to Laws and Regulations (X3) variables simultaneously have a significant influence on the Performance Accountability of Local Government Agencies. Whereas partially the variable of the application of the local government accounting system has a positive and significant effect on the accountability of the performance of local government agencies. Accounting understanding variables have a positive and significant effect on the performance accountability of local government agencies. The variable of accounting understanding has no effect on the accountability of the performance of local government agencies.

Keyword: *implementation of local government accounting systems, understanding of accounting, adherence to laws, regulation and performance accountability of local government agencies.*

PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, struktur SAPD memungkinkan pejabat yang menjalankan fungsi akuntansi memahami dan melaksanakan proses akuntansi dengan benar dan akurat. Dalam penyampaian laporan keuangan, pelaporan keuangan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terkait. Dalam mewujudkan berjalannya fungsi akuntansi dengan baik tersebut, para pengguna akuntansi di lingkungan pemerintah daerah sudah semestinya juga harus memahami bagaimana standar yang ada, ketentuan terkait kebijakan akuntansi di pemerintah daerah tersebut, dan juga bisa konsisten dalam menjalankan fungsi tersebut. Dalam studi ini peneliti menambahkan faktor penerapan sistem akuntansi yang ada, pemahaman akuntansi, serta ketaatan terhadap peraturan yang ada dalam mendukung terciptanya akuntabilitas yang baik di suatu pemerintahan daerah di Indonesia (Hasibuan, 2018).

Menurut Rachma (2017) faktor Yang mempengaruhi terciptanya akuntabilitas pemerintahan daerah yang Pertama yaitu penerapan sistem akuntansi Pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur *handle ding* maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data hingga pengolahan data, sistem akuntansi Pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur yang di input secara otomatis dan terkomputerisasi. Penerapan sistem akuntansi Pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan bertujuan untuk Meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pelaporan keuangan yang telah dihasilkan pemerintah melalui penyusunan dan pengembang SAPD dikatakan sebagai Sebuah pedoman dan menjelaskan siapa yang harus melakukan tugas tersebut dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi akuntansi dapat memahami dan menjalankan sistem akuntansi dengan baik dan benar. Apabila penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dilakukan secara benar dalam menyajikan laporan keuangan, maka pertanggungjawaban atas laporan keuangan akan menjadi baik sesuai yang telah ditentukan.

Selain menerapkan konsep sistem akuntansi pemerintahan daerah yang baik agar lebih memahami para pengguna akuntansi pemerintahan daerah juga mendukung suksesnya penyusunan laporan keuangan pemerintah yang baik dan akuntabel (Megawati dkk, 2015). Temuan BPK pada evaluasi laporan yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng Bali pada tahun 2013 menjumpai adanya ketidaksesuaian dalam pencatatan yang ada. Permasalahan utama yang ditemukan BPK terkait dengan realisasi pembayaran jasa dan aset yang tidak memenuhi realisasi yang sebenarnya, serta pengelolaan dana yang tidak memenuhi persyaratan pelaporan akibat lemahnya sistem akuntansi keuangan dan sumber daya manusia yang terkait dengan pelaporan keuangan. Dan penggunaan penemuan, sehingga mempengaruhi kualitas. Laporan keuangan dihasilkan. Dalam hal ini, kemampuan pemerintah dalam memberikan tentang kejelasan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat digunakan oleh para pemakai seperti pihak perusahaan maupun pemegang saham.

Dalam proses pencapaian tujuan pemerintah perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik, pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan untuk mengendalikan kebijakan keuangan daerah. Kewajiban tersebut merupakan pelaksanaan dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan PP. Nomor 3 Tahun 2007 yang di dalamnya mengatur tentang kewajiban tentang pelaporan keuangan bagi pemerintah daerah. Selain dengan penerapan sistem akuntansi dan didukung dengan pemahaman yang baik dari pengguna akuntansi di dalamnya, ketaatan terhadap peraturan ini sangat mempengaruhi kualitas dari laporan yang dihasilkan. Laporan pertanggungjawaban dan kebutuhan informasi publik kepada pemerintah pusat diharapkan akurat dan tepat.

Razi, (2017) mengatakan bahwa faktanya, dalam ke pemerintahan daerah cenderung tidak dapat mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut dan masih saja terdapat ketidakpatuhan dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Sebagian besar penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa objek yang mereka teliti

memang memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang implementasi SAPD. Namun pada penelitian Sari (2011) menjelaskan masih terdapat ketidakpatuhan dalam implementasi sistem akuntansi di pemerintah daerah yang menyimpulkan bahwa penerapan SAKD pada pemda kabupaten berjalan cukup baik dengan skor rata-rata 74,12%. Berdasarkan hal tersebut, artinya masih terdapat sekitar 25% praktik akuntansi yang tidak berjalan sesuai dengan instruksi dan peraturan yang berlaku. Selebihnya memang akan menghasilkan sebuah bentuk pelaporan tanggungjawab yang baik dan akuntabel. Namun, sebagian lain yang belum mentaati peraturan yang ada akan cenderung untuk sulit mendapatkan predikat akuntabel yang baik apabila masih belum sepenuhnya menjalankan dan mentaati peraturan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan (2018), Mubarraq (2017) dan Lumenta dkk (2016) mendapatkan hasil yang seragam bahwa adanya ketaatan pada peraturan yang berlaku akan semakin mendorong pemda untuk meraih predikat akuntabel pada pelaporan keuangan yang mereka susun.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan kinerja pemerintah daerah dilihat dari penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi dan ketaatan pada peraturan pada pemerintah daerah Kabupaten Sampang. Sehingga judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang”**.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan pada perundang-undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sampang.

Kontribusi Penelitian

Secara Teoretis

- a. Bagi peneliti selanjutnya
Tentunya dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman serta informasi tambahan yang dibutuhkan terkait dengan penerapan sistem akuntansi, pemahaman serta ketaatan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah terutama di bidang akuntansi sektor publik.
- b. Di bidang ilmu
Di bidang akuntansi sektor publik, hasil penelitian ini semoga mampu berkontribusi dalam perkembangan ilmu serta memberikan informasi yang lebih kepada pembaca guna membantu perkembangan ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini.

Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran serta menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, serta menambah wawasan mengenai hal-hal yang menjadi dasar dalam penelitian ini, terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sehingga dalam penelitian ini ditemukan faktor yang mempengaruhi hal tersebut ialah

penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dan pemahaman akuntansi yang berpengaruh sebesar 39.4%.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)

Menurut Haning, (2005) Akuntabilitas adalah tentang melaporkan tentang apa, bagaimana dan mengapa sumber daya dialokasikan untuk tujuan tertentu, bagaimana kekuasaan dijalankan, dan hubungan antara kekuatan yang diberikan dan hasil yang diharapkan dan dicapai. Dengan demikian pengertian akuntabilitas tidak hanya sebatas kewajiban melaporkan hasil pekerjaan, tetapi juga termasuk pencapaian tujuan dari apa yang sedang dilakukan. Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa fitur utama akuntabilitas, yaitu fokus pada hasil, menggunakan berbagai indikator yang dipilih untuk mengukur kinerja, menghasilkan informasi yang berguna untuk membuat keputusan program atau kebijakan, menghasilkan data yang konsisten sepanjang waktu dan pelaporan hasil. Dan menerbitkannya secara teratur (Sadjiarto, 2000). Konsep akuntabilitas merupakan salah satu ciri khas penerapan tata kelola yang baik. Ciri-ciri *good governance* yang dirumuskan dalam *Manila Declaration* (Wakhyudi, 2011) antara lain; transparan, bertanggung jawab, adil, dan demokratis.

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab lembaga publik dalam menjalankan tugasnya merupakan perwujudan tanggung jawab individu telah ditetapkan. Saya yakin dia bisa mencapai tujuan ini. Atau melalui media pertanggungjawaban rutin untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam dokumen rencana.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)

Menurut Mahmudi (2011) Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan rangkaian prosedur manual dan terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan dan penyusunan data hingga pelaporan status keuangan dan operasional keuangan pemerintah daerah. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) adalah alat yang digunakan untuk mengimplementasikan prinsip akuntansi yang ditentukan dalam SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD mendemonstrasikan serangkaian proses akuntansi, termasuk proses mengidentifikasi transaksi keuangan, menyimpan di jurnal, memposting ke buku besar, mengedit neraca, menyiapkan dokumen kerja konsolidasi, dan akhirnya menyiapkan laporan keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) merupakan rangkaian prosedur, mulai dari proses pendataan, pencatatan, ringkasan dan pelaporan keuangan, bertanggung jawab atas pelaksanaan APBD. Proses ini bisa dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi computer (Fathia, 2017).

Pemahaman Akuntansi

SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) adalah standar akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan keuangan pemerintah. Dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN / APBD, standar akuntansi pemerintahan paling kurang dapat digunakan sebagai laporan keuangan, antara lain laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas catatan atas laporan keuangan (Hasibuan, 2018).

Hasibuan, (2018) Pengertian akuntansi mengacu pada kemampuan satu atau lebih manajer keuangan untuk mengolah informasi akuntansi dan kemudian menyusunnya menjadi laporan keuangan yang disusun sesuai standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam proses pembuatan dan penyampaian laporan keuangan, pengetahuan pejabat pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap apakah karyawan dapat memproses informasi akuntansi dan memahami sumber dari mana laporan keuangan yang ditentukan pemerintah disiapkan dan disampaikan. Laporan yang disiapkan dan disampaikan memenuhi standar, berkualitas tinggi dan relevan dengan pengambilan keputusan.

Ketaatan Pada Peraturan Perundangan

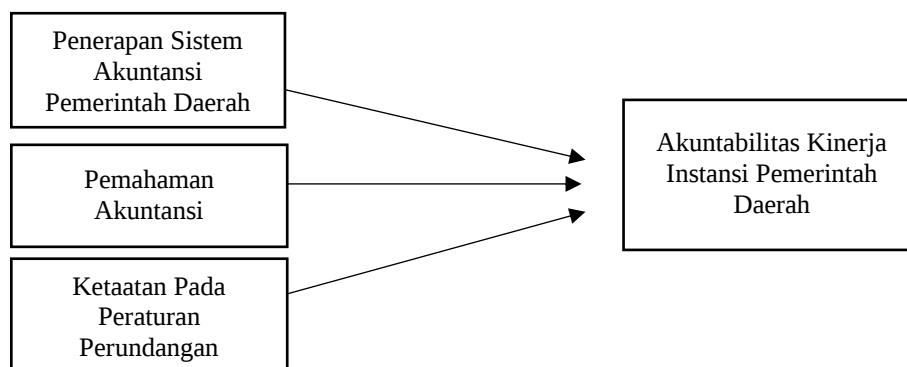
Fatmala, (2014) Saat menyiapkan dan mengajukan laporan pertanggungjawaban keuangan, pedoman dasar, standar akuntansi pemerintahan, harus konsisten dengan sistem anggaran pemerintah. Oleh karena itu, klasifikasi anggaran dari standar akuntansi pemerintahan harus sama dengan sistem anggaran. Artinya sistem akuntansi keuangan kota yang digunakan oleh pemerintah kota harus sesuai dengan anggaran pemerintah dan standar akuntansi (klasifikasi anggaran).

HIPOTESIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Hipotesis Penelitian

- H1 = Ada pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
- H1a = Ada pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
- H1b = Ada pengaruh pemahaman akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
- H1c = Ada pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari observasi dan pengalaman, observasi tersebut diperoleh melalui penelitian atau observasi, dan hasilnya disajikan dalam bentuk data yang dapat digunakan untuk mendukung teori kita. Penelitian ini menggunakan data mentah (data yang diperoleh langsung dari responden) untuk memperoleh informasi dengan menyebarkan kuesioner (Ihsanti, 2014:98).

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di SKPD di Kabupaten Sampang. Dalam proses pengumpulan data maupun memperoleh data yang terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti, maka waktu penelitian ini terhitung sejak bulan November 2020 sampai bulan Februari 2021.

Populasi dan Sampel

Menurut Aji (2018), “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD di Kabupaten Sampang. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017)”. Pemilihan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria tertentu.

Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Kepala SKPD di Kabupaten Sampang
2. Kepala Bagian Keuangan di Kabupaten Sampang
3. Kepala Sub Bagian Keuangan di Kabupaten Sampang

Definisi Operasional Variabel

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Variabel AKIP diukur menggunakan 10 alat pertanyaan yang sebelumnya digunakan yaitu kelancaran rencana, pengukuran kinerja, pelaksanaan anggaran, perencanaan visi dan tugas, indikator kinerja, analisis keuangan, laporan evaluasi, dan operasi yang direncanakan. Angket yang mengukur variabel terikat merupakan angket untuk variabel ini yang dikembangkan berdasarkan penelitian Hasibuan (2018). Kuesioner menggunakan skala likert untuk mengukur variabel ini yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = netral), skor 2 (TS = tidak setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1)

Variabel SAPD diukur dengan 6 item pertanyaan yang sebelumnya digunakan oleh Sumiati (2012), dengan 3 indikator yaitu pencatatan, klasifikasi dan pelaporan. Kuesioner menggunakan skala likert untuk mengukur variabel ini yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = netral), skor 2 (TS = tidak setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju).

Pemahaman Akuntansi (X2)

Variabel pemahaman akuntansi diukur dengan 10 pertanyaan dengan indikator, yaitu tingkat pemahaman laporan pertanggungjawaban dan prinsip akuntansi, serta tingkat pemahaman elemen identifikasi dalam laporan pertanggungjawaban. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel independen adalah kuesioner untuk variabel-variabel tersebut yang diteliti oleh Hasibuan (2018). Kuesioner menggunakan skala likert untuk mengukur variabel ini yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = netral), skor 2 (TS = tidak setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju).

Ketaatan pada Peraturan Perundangan (X3)

Variabel ketaatan terhadap regulasi diukur dengan 5 pertanyaan dan 3 indikator yaitu, melaksanakan akuntabilitas sesuai regulasi, memberikan sanksi, dan menyusun laporan sesuai regulasi. Angket yang digunakan untuk mengukur variabel bebas ini adalah angket untuk variabel ini yang dikembangkan berdasarkan penelitian Pertiwi & Utami (2020). Kuesioner menggunakan skala likert untuk mengukur variabel ini yaitu skor 5 (SS = sangat setuju), skor 4 (S = setuju), skor 3 (N = netral), skor 2 (TS = tidak setuju) dan skor 1 (STS = sangat tidak setuju).

Metode Analisis Data

Analisis regresi linier berganda adalah analisis regresi linier yang memprediksi keadaan (volatilitas) variabel dependen ketika dua atau lebih variabel independen menjadi indikator. Oleh karena itu, apabila jumlah variabel bebas minimal 2 (Sugiyono, 2018: 307) maka dapat dilakukan analisis regresi linier berganda. Tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh variabel independen (bebas) terhadap variabel independen (variabel dependen). Persamaan regresi yang termasuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	: Akuntabilitas Kinerja
a	: Konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃ , b ₄	: Koefisien regresi
X ₁	: Penerapan SAPD
X ₂	: Pemahaman Akuntansi
X ₃	: Ketaatan pada Peraturan Perundangan
e	: Nilai error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Sampel Penelitian

Peneliti berasumsi bahwa setiap SKPD akan mengirimkan 3 kuisioner, total ada 23 SKPD. 69 orang yang diwawancarai diperiksa.

Tabel 1
Penyebaran Kuesioner

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Jumlah kuesioner yang disebar	69
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0
3	Jumlah kuesioner yang kembali	69
4	Jumlah kuesioner yang tidak lengkap	0
5	Jumlah kuesioner yang bisa diolah	69

Sumber: data diolah penulis (2021)

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan SIP	69	2	5	3,56	,635
Pemahaman Akuntansi	69	3	5	3,73	,413
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	69	3	5	3,81	,440
AKIP	69	2	5	3,65	,605
Valid N (listwise)	69				

Dari gambar yang telah dihasilkan diatas maka kesimpulan yang dapat dijelaskan dari statistik deskriptif ialah sebagai berikut ini.

1. Variabel (X1) pada gambar diatas nilai rata-rata sebesar 3,56 yang mendekati nilai maksimum pada variabel ini memperlihatkan bahwa penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah atau X1 memiliki nilai yang baik terhadap penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,635 atau lebih kecil dari nilai rata-rata 3,56 menunjukkan bahwa tingkat keberagaman data atau persebaran data pada variabel ini adalah rendah.
2. Variabel (X2) pada tabel 2 menunjukkan nilai rata-rata sebesar 3,73 yang mendekati nilai maksimum pada variabel ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi (X2) memiliki nilai yang baik terhadap pemahaman akuntansi, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,413 atau lebih kecil dari nilai rata-rata

3,73 menunjukkan bahwa tingkat keberagaman data atau persebaran data pada variabel ini adalah rendah.

3. Variabel (X3) pada tabel 2 memperlihatkan nilai rata-rata sebesar 3,81 yang mendakti nilai maksimum pada variabel ini menunjukkan bahwa ketaatan pada peraturan perundangan (X3) memiliki nilai yang baik, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,440 atau lebih kecil dari nilai rata-rata 3,81 menunjukkan bahwa tingkat keberagaman data atau persebaran data pada variabel ini adalah rendah.
4. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) pada tabel tabel diatas nilai rata-rata sebesar 3,65 yang mendekati nilai maksimum pada variabel ini menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah memiliki nilai yang baik, sedangkan nilai standar deviasi sebesar 0,605 atau lebih kecil dari nilai rata-rata 3,65 menunjukkan bahwa tingkat keberagaman data atau persebaran data pada variabel ini adalah rendah

Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian normalitas pada tabel 3 data yang diolah menggunakan uji Kolmogorov Smirnov yang dapat disajikan sebagai berikut:

1. Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1) memiliki nilai *Kolomogorov Smirnov* sebesar 1,048 dengan nilai *Asymp.Sig* 0,222 hal ini menunjukkan bahwa Signifikansi > Probabilitas alpha (0,05) maka data variabel X1 dinyatakan berdistribusi normal.
2. Variabel Pemahaman Akuntansi (X2) memiliki nilai *Kolomogorov Smirnov* sebesar 1,267 dengan nilai *Asymp.Sig* 0,081 hal ini menunjukkan bahwa Signifikansi > Probabilitas alpha (0,05) maka data variabel X2 dinyatakan berdistribusi normal.
3. Variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) memiliki nilai *Kolomogorov Smirnov* sebesar 1,066 dengan nilai *Asymp.Sig* 0,206 hal ini menunjukkan bahwa Signifikansi > Probabilitas alpha (0,05) maka data variabel X3 dinyatakan berdistribusi normal.
4. Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Y) memiliki nilai *Kolomogorov Smirnov* sebesar 1,071 dengan nilai *Asymp.Sig* 0,201 hal ini menunjukkan bahwa Signifikansi > Probabilitas alpha (0,05) maka data variabel Y dinyatakan berdistribusi normal.

Uji Hipotesis

1. Uji F

Berdasarkan tabel 4, nilai F-hitung sebesar 15,740 dengan *sig-F* sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak menunjukkan bahwa variabel-variabel independen dalam model ini yaitu variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (X1), variabel Pemahaman Akuntansi (X2) dan variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan (X3) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari tabel 5 dapat kita ketahui bahwasanya nilai Adjusted R Square pada penelitian ini adalah sebesar 0.394 yang mana ini menandakan bahwa variabel X pada penelitian ini yaitu Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan mampu menjelaskan variabel Y yaitu akuntabilitas kinerja sebanyak 0.394 atau 39,4% sedangkan 60,6% dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak dipakai dalam penelitian ini.

3. Uji t (t-test)

1. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dari tabel 6 diperoleh nilai t hitung sebesar 2,420 dengan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak artinya penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Dari hasil penelitian yang telah didapatkan maka hasil dari penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Sella (2020) yang mengatakan bahwa penerapan SIP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja. Ketika sebuah instansi mampu menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan baik maka akuntabilitas kinerja karyawan pada instansi tersebut juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya penerapan sistem akuntansi instansi tersebut.

2. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dari tabel 6 diperoleh nilai t hitung sebesar 4,902 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak artinya pemahaman akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemahaman akuntansi dapat meningkatkan kinerja pegawai, karena pemahaman yang baik dapat memudahkan pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan meja kerja yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini memiliki kesamaan hasil dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani (2019) yang berjudul Dampak Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, Pemahaman Akuntansi, Kepatuhan Peraturan, dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. (Studi empiris tentang organisasi peralatan di Kabupaten Singge, Kuantan.) Menurutnya, pemahaman akuntansi, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pekerjaan berdampak positif terhadap sistem akuntabilitas kinerja organisasi peralatan di Kabupaten Sampang berpengaruh signifikan.

3. Pengaruh Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Dari tabel 6 diperoleh nilai t hitung sebesar 1,757 dengan nilai signifikansi $0,083 > 0,05$ maka H_1 ditolak dan H_0 diterima artinya pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Yang dimaksudkan dengan ketaatan dalam penelitian ini ialah bagaimana menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan pemerintah tentang laporan keuangan yang telah ditentukan. Pada penelitian ini ditemukan bahwa peraturan perundangan secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun karyawan memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundangan namun tidak memiliki pemahaman dan penerapan sistem akuntansi maka akuntabilitas kinerja karyawan tersebut tetap tidak akan meningkat.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Oktaviani (2019) dan Sella (2020) yang mengatakan bahwa Ketaatan pada Peraturan Perundangan dan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Perbedaan hasil penelitian tersebut bisa saja terjadi karena perbedaan objek penelitian, pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang para karyawan tidak terlalu memberikan perhatian terhadap peraturan perundang-undangan namun ketika mereka memahami penerapan suatu sistem maka mereka akan melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga akuntabilitas kinerjanya dapat dipertanggung jawabkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini dilakukan dengan Tujuan untuk mengetahui apakah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan memiliki pengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah daerah. Setelah mengumpulkan dan mengolah data, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
2. Secara parsial variabel Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
3. Secara parsial variabel Pemahaman Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
4. Secara parsial variabel Ketaatan Pada Peraturan Perundangan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Keterbatasan

Dilihat dari hasil penelitian yang telah didapatkan maka dalam hal ini hasil penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Keterbatasan dalam penelitian ini dari segi sampel yaitu hanya menggunakan 69 responden saja.
2. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menyebar kuesioner kepada responden.
3. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel bebas.

Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis merekomendasikan, diantaranya:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat menambahkan jumlah responden dalam penelitian agar hasil yang didapat lebih akurat.
2. Untuk para peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode pengumpulan data lainnya seperti misalnya melakukan wawancara atau observasi agar data yang diperoleh lebih akurat dan relevan.
3. Untuk para peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan penambahan variabel dalam penelitian ini agar pembahasan yang dihasilkan lebih luas seperti motivasi kerja, pengendalian akuntansi dan lain sebagainya yang belum digunakan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Tri Susilo Wahyu, Pratolo, Suryo. 2018. Pengaruh Politik Dinasti dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Pelaporan Sebagai Variabel Pemediasi: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2012-2015. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*. Vol 2, No 2.
- Fathia, Nurul. 2017. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip) (Study Kasus Skpd Di Provinsi Riau). *JOM Fekon* Vol. 4 No. 1.
- Fatmala, Juanita. 2014. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah). Skripsi. Universitas Bengkulu.
- Hasibuan, Janny, Rahmi. 2018. Pengaruh Perapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah Pada SKPD Padang Lawas. *Jurnal Akuntansi*. Vol 6. No 3.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Megawati, Luh Kadek Sri., Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Edy Sujana. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Tigadinas Kabupaten Buleleng). *E-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1*. Volume 3 No. 1.
- Mubaraq, husnul. 2017. Pengaruh Ketaatan Pada Perundang-Undangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Instansi Pemerintah Daerah di Kota Bukit tinggi). Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

- Razi, Riska Fahrul. 2017. Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). JOM Fekon. Vol. 4 No. 1.
- Sella, Esha Selvia. 2020. Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pasuruan). E-JRA. Vol. 09 No. 10.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
- Suhartono, Ehrmann dan Mochammad Solichin, 2007. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi, Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.
- *) Dina Karima adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- **) Maslichah adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.
- ***) Dwiyani Sudaryanti adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

Lampiran

Tabel 3
Hasil uji normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Penerapan SIP	Pemahaman Akuntansi	Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	AKIP
N		69	69	69	69
Normal Parameters(a,b)	Mean	21,33	37,30	18,84	36,54
	Std. Deviation	3,810	4,131	2,633	6,045
Most Extreme Differences	Absolute	,126	,153	,128	,129
	Positive	,126	,153	,118	,129
	Negative	-,117	-,096	-,128	-,093
Kolmogorov-Smirnov Z		1,048	1,267	1,066	1,071
Asymp. Sig. (2-tailed)		,222	,081	,206	,201

Tabel 4
Hasil Uji F
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1045,704	3	348,568	15,740	,000(a)
	Residual	1439,456	65	22,145		
	Total	2485,159	68			

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,646(a)	,418	,394	4,705

Tabel 6
Hasil Uji T
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3,388	6,187		-,548	,586

Penerapan SIP	,381	,157	,233	2,420	,018
Pemahaman Akuntansi	,625	,127	,475	4,902	,000
Ketaatan Pada Peraturan Perundangan	,446	,254	,158	1,757	,083